**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN
ANTARA PT. MIMI KIDS GARMINDO DENGAN BANK
NUSANTARA PARAHYANGAN**

Oleh : Santri Alifya

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing II: Riska Fitriani S.H.,M.H

Alamat: Jl. Pembangunan No.6 Rumbai, Pekanbaru

Email: deaalifya@yahoo.com - Telepon :082239419498

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of all the assets of a Bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by a curator under the supervision of the Supervising Judge as regulated in the Bankruptcy Act. Provisions on simple proof as stipulated in the Bankruptcy Act are very concise and are not supported by a series of provisions and other explanations in the rule that contain clear characteristics of simple evidences especially about what must be proven in simple evidences

This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by researching library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of the problem through a statute approach carried out by examining the laws and regulations that relate to the legal issue under study. In this study the authors conducted a study of the principles of law by utilizing descriptive methods. Data collection techniques used in the Normative Legal Research are library research methods (library research) which uses the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problems to be studied.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is the Settlement of bankruptcy cases between PT. Mimi Kids Garmino with Bank Nusantara Parahyangan based on Decision Number 146 / Pdt.Sus-PKPU / 2017 / PN.Niaga. Jkt. PST still has not provided legal certainty. the requirement to file for bankruptcy is the lawmakers' negligence in formulating Article 2 paragraph (1), in the absence of a "unable to pay" requirement, the creditor can easily submit a request for bankruptcy statements without having to prove that the company is unable or insolvent. Proof of regulation in the case of PKPU in Act Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment is not as simple as intended in Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy Law. It is still often found in debtor bankrupt trials that have been proven to have more than two creditors and one of the debts has fallen into disrepair, but cannot be bankrupt on the pretext that debtors' debts are complicated debts and are not the authority of the Commercial Court because the principal the dispute must be proven in the District Court.

Keywords: Juridical Review, Settlement, Bankruptcy Case,

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) mekanisme yang ditawarkan adalah proses persidangan untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, terbuka, cepat dan efektif. Mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan, karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitor guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.¹ Secara sederhana, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.³ Kepailitan pada intinya sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*algemeen beslag*) atas segala harta benda dari pada

si Pailit.⁴ Sitaan secara umum ini dilakukan atas semua harta benda daripada si Pailit. Sebagai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.⁵

Adapun kasus terkait dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk yang bertindak sebagai pemohon dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan PT. Mimi Kids Garmindo yang bertindak sebagai termohon dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan putusan pengadilan yang menangani perkara Bank Nusantara Parahyangan (BNP) dengan pihak PT Kids Mimi Garmindo. Di dalam Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 154.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

⁴ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1998, hlm. 3-4.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 175.

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa PT.Kids Mimi Garmino sudah dinyatakan pailit, akan tetapi dalam proses pembuktiannya pihak kreditor tidak dapat menghadir kreditor. Padahal jika mengacu terhadap syarat formal untuk pengajuan PKPU, debitur harus memilik lebih dari 1 (satu) kreditor sesuai Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Berdasarkan Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembayaran utang harus dilakukan secara keseluruhan. PT Mimi Kids Garmino hanya membayar ke satu kreditor yang telah dilakukan sebelumnya namun menganggap bahwa telah melakukan kewajiban seluruhnya dalam PKPU.

Permohonan PKPU ini biasanya hanya merupakan cara dari debitur untuk menghindari adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. Karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 229 Ayat (3) UUKPKPU, dimana apabila permohonan-permohonan untuk PKPU dan kepailitan diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada waktu yang bersamaan, maka permohonan untuk PKPU akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu.⁶ Perubahan mendasar dari ketentuan kepailitan ini adalah dianutnya teori baru mengenai kepailitan dari semula kepailitan adalah penyelesaian utang karena adanya kebangkrutan yang secara

normatif dirumuskan dengan “dalam keadaan berhenti membayar” menjadi mekanisme penagihan hutang yang secara normatif dirumuskan dengan “tidak membayar lunas”.⁷

Permohonan penundaan pembayaran dilakukan oleh debitur dengan tujuan debitur diberikan waktu (tempo) oleh pengadilan niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utangutangnya kepada para kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitur dalam surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.⁸ Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang K-PKPU maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Ketentuan tentang pembuktian sederhana sebagaimana diatur UUK sangat

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 223 Ayat (3).

⁷ Djoko Imbawani Atmadjaja, “Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Artikel Pada Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Vol.19, No.1 Juni 2012, hlm.13.

⁸ Catur Irianto, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015, hlm,412.

ringkas dan tidak didukung dengan rangkaian ketentuan serta penjelasan lainnya didalam kaidah tersebut yang memuat ciri-ciri yang yang jelas tentang pembuktian sederhana khususnya tentang apa yang harus dibuktikan dalam pembuktian sederhana. Perihal pengajuan Permohonan PKPU dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU yang berkaitan dengan pembuktian secara sederhana dari adanya Permohonan PKPU. Pembuktian saat terjadinya suatu perkara merupakan bagian yang kompleks. Pembuktian merupakan bagian yang kompleks dikarenakan membuktikan suatu hal berkaitan dengan kemampuan mengkontruksikan kejadian yang telah terjadi sebagai suatu kebenaran.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan

Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst?

2. Bagaimanakah pengaturan pembuktian pada perkara PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

2. Untuk mengetahui pengaturan ideal proses pembuktian pada perkara PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum, dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum perdata bisnis.

2. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta memberikan motivasi bagi

⁹ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Group, Jakarta, hlm. 496.

rekan-rekan mahasiswa untuk menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan suatu penelitian selanjutnya.

3. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum dalam hal tinjauan yuridis penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Ps

D. Kerangka teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Harapan akan adanya kepastian hukum akan menjamin ketertiban di kalangan masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi ketertiban masyarakat.¹⁰

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karenahukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil

¹⁰ Munir Fruady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberagamaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 53.

terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

2. Teori Keadilan

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja: para yustisiabel (pada umumnya pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim; buruh yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya; dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak, warga negara yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi, penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Keadilan kiranya tidak harus hanya dilihat dari satu pihak saja, tetapi harus dilihat dari dua pihak.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹²
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 99.

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Panduan Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 26.

perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹³

3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁴
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.¹⁵
5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.¹⁶
6. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh

¹³ Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1861/pkpu>, yang di akses pada 1 Mei 2019 pukul 20:00 wib

curator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.¹⁷

7. Penyelesaian adalah proses, cara perbuatan, menyelesaikan (di berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁸
8. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, petengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara dan sebagainya.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menganalisis Pembuktian dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan.”

2. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *OpCit*, hlm. 102.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 103.

berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari literatur kepustakaan guna menganalisa/arahan mendukung data primer, baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan limitasi waktu didalam Pilkada.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²¹ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²²

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Kepailitan Antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan Berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung) turun drastis menjadi 154 hari. Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kasasi di tingkat

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32

²² Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

kasasi dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Permasalahan penyelesaian perkara kepailitan yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah PT. Bank Nusantara Parahyangan dengan PT. Mimi Kids Garmino. PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk yang bertindak sebagai pemohon dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan PT. Mimi Kids Garmino yang bertindak sebagai termohon dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan putusan pengadilan yang menangani perkara Bank Nusantara Parahyangan (BNP) dengan pihak PT Kids Mimi Garmino. Di dalam Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwa PT.Kids Mimi Garmino sudah dinyatakan pailit, akan tetapi dalam proses pembuktiannya pihak kreditor tidak dapat menghadiri kreditor. Padahal jika mengacu terhadap syarat formal untuk pengajuan PKPU, debitur harus memilik lebih dari 1 (satu) kreditor sesuai Pasal 222 Ayat 1 Undang-Undang KPKPU. Berdasarkan Pasal 245 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembayaran utang harus dilakukan secara keseluruhan. PT Mimi Kids Garmino hanya membayar ke satu kreditor yang

telah dilakukan sebelumnya namun menganggap bahwa telah melakukan kewajiban seluruhnya dalam PKPU.

Berdasarkan 3 dasar pertimbangan mejelis hakim pada masing-masing tingkatan pengadilan dapat dilihat bahwa ada perbedaan. Pada tingkat Pertama dikabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh pemohon PKPU terhadap para termohon PKPU untuk seluruh dengan segala akibat hukumnya. Pada tingkat banding menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding I/Terbanding dan Tergugat/Pembanding II/Terbanding dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 482/Pdt.G/2016/PN.Bdg. tanggal 20 Juli 2017. Sedangkan pada tingkat Kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT Mimi Kids Garmino, 2. Wiharja Setiawan, 3. Paula Yusuf, tersebut dan Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Agustus 2018.

Seharusnya dalam Putusan majelis yang mengabulkan permohonan PKPU pemohon pada tingkat pertama perlu dipertimbangkan. adanya bukti pelunasan kepada kreditor dipertimbangkan sebelum memutuskan sebuah perusahaan masuk PKPU. Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga

menyatakan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pembuktian dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sederhana, sehingga apabila debitor pailit telah mempunyai paling sedikit dua kreditor dan salah satunya di antaranya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih maka debitor tersebut dinyatakan pailit.

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pernyataan pailit terhadap termohon pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan terutama Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka PT.Kids Mimi Garmino dinyatakan pailit.

Hal tersebut secara tegas di atur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, bahwa kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan

sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Maka dalam penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan dibutuhkan kepastian hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan, kepastian terkait dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang K-PKPU harus diperjelas dan dipertegas agar pengadilan niaga memiliki ketentuan dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Maka berdasarkan pemaparan diatas, menurut kesimpulan penulis bahwa salah satu kelemahan yang paling mendasar dari UUKPKPU adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa pengajuan kepailitan hanya dengan dua Kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo serta tidak adanya pengaturan batas minimum jumlah utang. Pernyataan ini diperkuat dengan Putusan MK dalam uji materil UU KPKPU dalam Putusan Nomor 071/PUU-II/2004 dan Nomor 001-002/PUU-III/2005 yang menyatakan longgarnya syarat mengajukan permohonan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka Kreditor dapat dengan mudah

mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu atau insolven (*insolvent*).

B. Pengaturan Pembuktian Pada Perkara PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Hukum acara perdata sebagai salah satu sistem bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu maka sub sistem pembuktian merupakan keseluruhan ketentuan tentang pembuktian yang tersusun secara teratur yang satu sama lain saling kait mengkait, dan bertujuan untuk dapat menentukan terbukti tidaknya suatu peristiwa tertentu yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan.

Dalam penyelesaian suatu kasus kepailitan, dianut suatu asas Pembuktian Sederhana. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari hukum kepailitan yaitu untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dengan dianutnya asas Pembuktian Sederhana seyogyanya salah satu tujuan dari hukum kepailitan yaitu "cepat" dapat "tercapai". Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir. Pembuktian sederhana ini merupakan syarat yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 jo.

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998, yang menyatakan: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Permasalahan yang terjadi dalam perkara kepailitan adalah mengenai penerapan Pembuktian Sederhana dikarenakan permasalahan penerapan tersebut tidak dijelaskan baik pengertian maupun batasan-batasan yang secara jelas diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya, Undang-Undang Kepailitan). Undang-undang hanya menentukan apa yang telah tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan sebagai berikut : "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi". Yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) merupakan syarat kepailitan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Pada Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dimaksudkan dalam Penjelasan Undang-Undang Kepailitan Pasal 8 ayat (4) adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah Utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa dalam perkara pailit, debitor yang akan dipailitkan harus terbukti secara sederhana, bahwa debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, barulah hakim bisa memutus pailit kepada debitor.

Di dalam Penyelesaian perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui secara objektif tentang kebenaran peristiwanya melalui pembuktian. Dengan demikian, maksud pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran peristiwa dan tujuannya adalah untuk menetapkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan

hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundangundangan yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa.²³

Ketentuan tentang pembuktian sederhana sebagaimana diatur UUK sangat ringkas dan tidak didukung dengan rangkaian ketentuan serta penjelasan lainnya didalam kaidah tersebut yang memuat ciri-ciri yang yang jelas tentang pembuktian sederhana khususnya tentang apa yang harus dibuktikan dalam pembuktian sederhana. Perihal pengajuan Permohonan PKPU dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK-PKPU yang berkaitan dengan pembuktian secara sederhana dari adanya Permohonan PKPU. Pembuktian saat terjadinya suatu perkara merupakan bagian yang kompleks. Pembuktian

²³ Tata Wijayanta, Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap Kebenaran Formil, Laporan *Penelitian Bagian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

merupakan bagian yang kompleks dikarenakan membuktikan suatu hal berkaitan dengan kemampuan mengkonstruksikan kejadian yang telah terjadi sebagai suatu kebenaran.²⁴

Pendirian Majelis Hakim kasasi dalam perkara kepailitan tersebut di atas perlu dipertanyakan. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau dengan kata lain fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengakibatkan bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga.

Apabila asal 8 ayat (4) UUK-PKPU tersebut ditafsirkan seperti itu, maka samalah artinya bahwa pada perkaraperkara utang-piutang yang sangat ruwet (*complicated*) dan yang pembuktian fakta dan keadaannya tidak dapat dilakukan secara sederhana, antara lain perkara-perkara kredit sindikasi perbankan, menjadi tidak mungkin bagi krediturnya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Kalau untuk perkara utang-piutang yang sangat ruwet itu tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan

Niaga, maka menjadi tidak ada artinya ketentuan pasal 1131 KUHPerdara yang merupakan sumber hukum kepailitan. Penafsiran yang demikian itu mengakibatkan kreditor dari kredit perbankan yang ruwet, yaitu bank-bank menjadi terpasung haknya untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini tidak adil.

Putusan permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan oleh pengadilan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, hakim akan membuktikan fakta atau peristiwa yang ada. Dalam acara pembuktian perkara kepailitan di pengadilan niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menganut prinsip pembuktian sederhana yang umumnya tidak dikenal dalam tata cara perdata yang diatur dalam *Herziene Indonesich Reglemenl* (HIR) (*Sib 1926-559* jo *Sib 1941-44*). Dalam konsep pembuktian sederhana ini, kebenaran fakta yaitu adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah menjadi bukti nyata (*prima factie evidence*) dan tidak dapat dipersoalkan kembali (dibantah) oleh pihak lawan." Pembuktian seperti dikenal juga sebagai pembuktian sumir (*summarily proving*) yang berlaku dalam

²⁴ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Group, Jakarta, hlm. 496.

acara pidana dalam pemeriksaan cepat di pengadilan.²⁵

Adapun dasar hukum lebih lanjut terkait dengan jumlah 1 (satu) kreditur tidak dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilihat dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa syarat adanya Kreditor kedua cukup dibuktikan dengan Neraca/Laporan keuangan dari Termohon pailit, yang sudah diaudit maupun yang belum. Kreditor kedua harus dibuktikan dengan bukti surat (*loan agreement*) atau saksi (Kreditor kedua hadir), kecuali diakui oleh Debitor.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, menurut John Rawls keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Maka pengaturan pembuktian pada perkara PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah memperhatikan prinsip keadilan.

²⁵ Fanny Kurniawan, *Penerapan Hal Jaminan Da'am Kepailitan*, Tugas khusus vak khusus hukum kepailitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.. Yogyakarta, 2004, hlm. 28

Pembuktian sederhana ini dalam praktek di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidak jelasan pengertian pembuktian sederhana. Pada kenyataannya sering dijumpai dalam persidangan pailit debitor yang sudah terbukti mempunyai kreditor lebih dari dua dan salah satu dari utangnya sudah jatuh jempo, tetapi tidak bisa dipailitkan dengan dalih bahwa utang-piutang debitor merupakan utang-piutang yang ruwet dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga karena pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara kepailitan antara PT. Mimi Kids Garmino dengan Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst masih belum memberikan kepastian hukum. syarat mengajukan permohonan pailit merupakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 2 ayat (1), dengan tidak adanya persyaratan “tidak mampu membayar”, maka Kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus

membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu atau *insolven*

2. Pengaturan pembuktian pada perkara PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana. Masih sering dijumpai dalam persidangan pailit debitur yang sudah terbukti mempunyai kreditor lebih dari dua dan salah satu dari utangnya sudah jatuh jempu, tetapi tidak bisa dipailitkan dengan dalih bahwa utang-piutang debitur merupakan utang-piutang yang ruwet dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga karena pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri

B. Saran

1. Penyelesaian perkara kepailitan harus diperjelas dan dipertegas agar pengadilan niaga memiliki ketentuan dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga merupakan

hal yang sangat penting perlu ditinjau kembali agar para pihak memiliki acuan dan tidak mudah dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan pembuktian yang sudah direvisi.

2. Pengaturan pembuktian pada perkara PKPU dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus di pertegas dan memperhatikan prinsip keadilan. sehingga tidak ada lagi penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidak jelasan pengertian pembuktian sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Panduan Pelajar, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeny, 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gautama, Sudargo 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,*

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Group, Jakarta.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah

Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015.

Djoko Imbawani Atmadjaja, "Kedudukan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Artikel Pada Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widyagama, Vol.19, No.1 Juni 2012.

Donald NEUFELD, *Five Of The Legal Opinions Will Be Disclosed Because They Are In The Public Domain*, September 5, 2006. *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I2d3af97d656a11db8af7b21dc878c125/View/FullText.htm>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019, Pukul 11.30 WIB.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

D. Website

<https://www.hukumonline.com/kinik/detail/ulasan/c11861/kipu>, yang di akses pada 1 Mei 2019 pukul 20:00 wib